



2024

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA

**Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur**



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan tahun 2023, capaian renstra, analisis kinerja pelayanan DPMTSP, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan rancangan akhir perubahan rencana kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Manggar, Agustus 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST
NIP 19750821 200212 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-2

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja..... I-5

1.4. Sistematika Penulisan I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024..... II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-13

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... II-16

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2024..... II-16

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... II-25

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III-1

BAB IV PENUTUP IV-1



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.....	II-2
TABEL 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.....	II-14
TABEL 2.3	Review Terhadap Rencana Kerja RKPD Perubahan Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.....	II-18
TABEL 3.1	Rekapitulasi Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.....	III-2
TABEL 3.2	Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur.....	III-3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Perangkat Daerah dan memenuhi amanat Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 ini dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada tahun 2024.

Perubahan ini juga dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1): Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi; a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur sebagai Instansi Daerah yang menangani Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar berupa urusan Penanaman Modal berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Lampiran VI) tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) kemudian menyusun



Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan renja perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan keduanya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil



- Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
 20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);
 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114)



26. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 20), dan;
27. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 18).

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Perubahan Dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.

2. Tujuan

Dokumen Renja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Belitung Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan



**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan triwulan II tahun 2024 merupakan evaluasi pelaksanaan dari renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur. Evaluasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Hasil evaluasi Renja ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024.

Data capaian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur diambil berdasarkan data capaian pelaksanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 seperti yang tergambar pada Tabel 2.1 memperlihatkan capaian rata-rata kinerja fisik sebesar 53,38 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 30,52% dari keseluruhan pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar urusan penanaman modal yang dijabarkan melalui 6 Program dan 13 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan, dengan jumlah anggaran Belanja seluruhnya sebesar Rp 6.159.195.566,- dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan kedua sebesar Rp 1.879.611.670,-.

Masih rendahnya capaian kinerja dan capaian realisasi keuangan dikarenakan pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan pada Triwulan kedua, khususnya kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Fasilitas Penanaman Modal tahun 2024 baru dilaksanakan pada minggu ke 3 bulan Juni 2024, sehingga realisasi keuangan masih dalam proses, dikarenakan anggaran baru salur di bulan April 2024.

Berikut hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur pada masa berjalan tahun 2024 sampai dengan triwulan dua tahun 2024.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur

No	Sasara n	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan
										I		II						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Semua Bidang																
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)	82,00	-	92,31	-	76	4.700.626.066		534.138.811		1.175.720.252	71,11	1.709.859.063	93,57%	36,38%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)		-	0,00	-	100	6.369.000	-	-	100	980.000	100,00	980.000	100,00%	15,39%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)		-	0,00	-	4	6.369.000	-	-	-	980.000	-	980.000	0,00%	15,39%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (Persen)		-	0,00	-	100	2.993.278.326	-	409.889.200	100	824.685.059	100,00	1.234.574.259	100,00%	41,24%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		-	0,00	-	36	2.993.278.326	19	409.889.200	20	824.685.059	20,00	1.234.574.259	55,56%	41,24%	



No	Sasara n	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan
										I		II						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)		-	0,00	-	79	39.600.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		-	0,00	-	8	39.600.000	-	-	1	-	1,00	-	12,50%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		-	0,00	-	85	632.805.000	-	16.656.343	80	142.323.839	80,00	158.980.182	94,12%	25,12%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	12	20.340.000	3	-	3	3.250.000	6,00	3.250.000	50,00%	15,98%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	12	123.024.000	3	-	3	6.851.000	6,00	6.851.000	50,00%	5,57%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	9	31.400.000	-	-	2	7.818.800	2,00	7.818.800	22,22%	24,90%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		-	0,00	-	12	36.949.000	4	-	3	7.563.600	7,00	7.563.600	58,33%	20,47%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan		-	0,00	-	12	61.257.000	3	-	3	5.200.000	6,00	5.200.000	50,00%	8,49%	



No	Sasara n	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan	
									I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penggandaan yang Disediakan (Paket)															
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)		-	0,00	-	3	4.860.000	2	-	2	1.024.000	1,00	1.024.000	33,33%	21,07%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		-	0,00	-	8	4.975.000	-	-	2	954.000	2,00	954.000	25,00%	19,18%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		-	0,00	-	68	350.000.000	12	16.656.343	20	109.662.439	32,00	126.318.782	47,06%	36,09%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		-	0,00	-	60	50.650.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-	0,00	-	13	50.650.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)		-	0,00	-	88	744.073.740	-	96.097.268	80	178.290.354	80,00	274.387.622	90,91%	36,88%	



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2024

No	Sasara n	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan	
									I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		-	0,00	-	12	184.775.000	3	28.780.000	3	51.365.000	6,00	80.145.000	50,00%	43,37%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	166.660.000	3	19.417.268	3	43.010.354	6,00	62.427.622	50,00%	37,46%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		-	0,00	-	12	392.638.740	3	47.900.000	3	83.915.000	6,00	131.815.000	50,00%	33,57%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)	92,00	-	0,00	-	94	233.850.000	80	11.496.000	83	29.441.000	83,00	40.937.000	88,30%	17,51%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		-	0,00	-	20	146.130.000	10	11.496.000	11	24.926.000	5,25	36.422.000	26,25%	24,92%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	3	64.100.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2024

No	Sasara n	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan		
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		-	0,00	-	50	23.620.000	-	-	11	4.515.000	11,00	4.515.000	22,00%	19,12%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,67%	36,38%	
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																		
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan (Persen)	100,00	-	60,00	-	66,67	39.246.000		-		-	-	-	0,00%	0,00%			
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan (Kebijakan)		-	0,00	-	2	9.026.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)		-	0,00	-	1	9.026.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	persentase informasi investasi yang tersedia (persen)		-	0,00	-	100	30.220.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			



No	Sasara n	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan		
										I		II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)		-	0,00	-	1	30.220.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						0,00%	0,00%			
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi (Investor)	9,00		54,00		2	367.385.000		4.007.400		22.225.207	2,00	26.232.607	100,00%	7,14%			
			Jumlah promosi penanaman modal daerah terlaksana (Angka)	NAN		0,00		-		0								-	0,00%	
			Jumlah promosi penanaman modal daerah terlaksana (Angka)	NAN		0,00		0								-		0,00%		
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan sektor usaha yang dipromosikan (sektor)		-	0,00	-	4	367.385.000	-	4.007.400	-	22.225.207	-	26.232.607	0,00%	7,14%			



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2024

No	Sasara n	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan	
									I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)		-	0,00	-	1	237.452.000	-	-	-	16.970.207	-	16.970.207	0,00%	7,15%	
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)		-	0,00	-	1	129.933.000	-	4.007.400	1	5.255.000	1,00	9.262.400	100,00%	7,13%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						35,37%	7,14%	
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu (Persen)	86,00	-	94,70	-	84,5	288.310.000		26.290.000		54.510.000	84,50	80.800.000	100,00%	28,03%	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan (persen)		-	0,00	-	10	288.310.000	-	26.290.000	-	54.510.000	-	80.800.000	0,00%	28,03%	



No	Sasara n	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan	
										I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)		-	0,00	-	175	250.250.000	175	25.660.000	-	50.940.000	175,00	76.600.000	100,00%	30,61%		
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)		-	0,00	-	60	38.060.000	3	630.000	15	3.570.000	18,00	4.200.000	30,00%	11,04%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							90,76%	28,03%	
										Predikat Kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya (Investor)	22,00	-	1,00	-	20	716.485.500		4.760.000		44.870.000	1,00	49.630.000	5,00%	6,93%		



No	Sasara n	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan
										I		II						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (persen)		-	0,00	-	8	716.485.500	-	4.760.000	4	44.870.000	4,30	49.630.000	53,75%	6,93%	
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)		-	0,00	-	12	125.940.500	-	4.760.000	-	8.330.000	-	13.090.000	0,00%	10,39%	
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)		-	0,00	-	216	405.144.000	-	-	216	-	216,00	-	100,00%	0,00%	



No	Sasara n	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan	
									I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)		-	0,00	-	65	185.401.000	17	-	13	36.540.000	30,00	36.540.000	46,15%	19,71%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						68,49%	6,93%	
										Predikat Kinerja						Sedang	Sangat Rendah	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha (Persen)	100,00	-	100,00	-	72,73	47.143.000		4.760.000		8.330.000	-	13.090.000	0,00%	27,77%	
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (persen)		-	0,00	-	0	47.143.000	-	4.760.000	-	8.330.000	-	13.090.000	0,00%	27,77%	



No	Sasara n	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Keterangan	
									I		II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=10/7x100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)		-	0,00	-	12	47.143.000	3	4.760.000	3	8.330.000	6,00	13.090.000	50,00%	27,77%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)						50,00%	27,77%	
										Predikat Kinerja						Sangat Rendah	Sangat Rendah	
								6.159.195.566		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM			1.879.611.670			53,38%	30,52%	
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM						Rendah	Sangat Rendah	



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur yang mengampu urusan Penanaman modal diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD Perubahan 2021-2026. Penetapan Indikator ini memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing pada urusan masing-masing Perangkat Daerah. Akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan setiap tahun merupakan kondisi kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan urusan penanaman modal sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur data capaiannya bersumber dari data capaian kinerja urusan Penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung di tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat dalam tabel 2.2



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona I	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Indikator Renstra 2021-2026											
1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik PTSP			53	54	60	67	73,83	78,73	94,35	94,35	
1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang			65-76,60 = C	65-76,60 = C	65-76,60 = C	65-76,60 = C	74,75 = C	85,33 = B	86,78=B	86,78=B	
1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah			B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	B > 60-70	63,08 = B	71,72 BB	72,51 = BB	72,51 = BB	
1.3	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan			Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang (79,99)	81,5 (kualitas tinggi)	94,53 (Kualitas Tertinggi)	94,53 (Kualitas Tertinggi)	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2,6	2,7	2,8	2,9	2,15	2,7	3,56	3,56	
2.1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi			63 persen	65,00 persen	67,00 persen	69,00 persen	83,33persen	100 persen	100	100 persen	
3	Nilai Investasi Tahunan Berskala Nasional (PMA/PMDN)			359,057 juta rupiah	378771 juta rupiah	390513 juta rupiah	472,466juta rupiah		1.373,500 juta rupiah	616.140 juta rupiah	616.140 juta rupiah	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona I	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
3.1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM			11,16 persen	11,20 persen	11,40 persen	11,60 persen	64,84 persen	22,67 persen	32,80	32,80 persen	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan Penanaman modal dan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur, menghadapi berbagai permasalahan dan isu strategis. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Kurangnya informasi potensi investasi yang lebih terperinci dan terkini
- b. Masih banyak masyarakat yang belum paham proses perizinan secara online
- c. Rendahnya kesadaran penanam modal dalam melaporkan nilai real (sebenarnya) realisasi investasi mereka.
- d. Belum adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Belitung Timur yaitu merupakan Pelayanan Publik terintegrasi yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Untuk menjawab hal tersebut didalam perubahan rencana kerja tahun 2024 ini dilakukan berbagai penyesuaian diantaranya penyesuaian kebutuhan anggaran dan target dari program/ kegiatan dan sub kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024

Dari perubahan Renja yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang ada pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur, dengan memperhatikan rencana strategis kementerian terkait dan kesesuaian dengan RPJMD Kabupaten Belitung Timur yang diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan.

Dalam Dokumen perubahan Rencana Kerja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap perubahan RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD maupun DAK, beserta pendanaan indikatif.

Perbedaan antara Rencana Kerja awal dengan hasil analisis kebutuhan sebagian besar disebabkan :

1. Penyesuaian beberapa target indikator sub kegiatan. untuk kegiatan yang bersumber dari DAK Bidang Fasilitas Penanaman modal di tahun 2024 dikarenakan Juknis penggunaan DAK Non Fisik Bidang Fasilitas Penanaman Modal baru terbit pada tanggal 30 Desember tahun 2023 sehingga penyesuaian target indikator baru dapat disesuaikan pada perubahan renja 2024 ini.



-
2. Perubahan pagu indikatif yang disesuaikan dengan rencana target indikator dan kebutuhan yang akan dicapai pada tahun 2024;
 3. Adanya rencana pelaksanaan pelayanan public terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik di triwulan IV tahun 2024, sehingga membutuhkan anggaran operasional pendukung awal pelaksanaan Mal Pelayanan Publik tersebut.

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3 Review terhadap Rencana Kerja RKPD Perubahan Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BelitongTimur.



Tabel 2.3
Review Terhadap Rencana Kerja RKPD Perubahan Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu (Rp)		
1	2	3	4		5	1	2	3	4		5	6	
URUSAN PENUNJANG					5.115.626.066	URUSAN PENUNJANG					5.095.626.066		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	76	persen	5.115.626.066	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	76	persen	5.095.626.066		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	persen	6.369.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	persen	6.369.000		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	6.369.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	6.369.000		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100	persen	3.040.278.326	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100	persen	3.021.707.426		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Orang	3.040.278.326	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang	3.021.707.426	Penyesuaian kebutuhan	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang berkinerja baik	79	persen	39.600.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase aparatur yang berkinerja baik	79	persen	39.600.000		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	OPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	OPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang			



RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu (Rp)	
1	2	3	4		5	1	2	3	4		5	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Kab. Beltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	Orang	39.600.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Daerah dan Kab. Beltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	Orang	39.600.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	85	persen	632.805.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	85	persen	631.716.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	20.340.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	20.215.000	Penyesuaian kebutuhan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	123.024.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	OPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	122.060.000	Penyesuaian kebutuhan
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	paket	31.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	paket	31.400.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	36.949.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	36.949.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	61.257.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	61.257.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	dokumen	4.860.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4	dokumen	4.860.000	
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	OPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5	laporan	4.975.000	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	OPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5	laporan	4.975.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68	laporan	350.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68	laporan	350.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	60	persen	50.650.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	60	persen	50.650.000	



RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 unit	50.650.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 unit	50.650.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang kantor	88 persen	762.073.740	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang kantor	88 persen	738.359.640	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	184.775.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	183.575.000	Penyesuaian kebutuhan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	166.660.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	166.660.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	410.638.740	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	388.124.640	Penyesuaian kebutuhan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	94 persen	583.850.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	94 persen	607.224.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Beltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	146.130.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Beltim	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	146.130.000	



RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu (Rp)	
1	2	3	4		5	1	2	3	4		5	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Beltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	unit	414.100.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Beltim	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	unit	437.474.000	Penyesuaian kebutuhan
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Beltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	unit	23.620.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Beltim	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	unit	23.620.000	
PENANAMAN MODAL					1.451.969.500	PENANAMAN MODAL					1.451.969.500	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	66,67	persen	39.246.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	66,67	persen	39.246.000	
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	1	kebijakan	9.026.000	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	1	kebijakan	9.026.000	
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Beltim	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas.Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	dokumen	9.026.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Beltim	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas.Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	dokumen	9.026.000	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah		dokumen		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah		dokumen		
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase informasi investasi yang tersedia	100	persen	30.220.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase informasi investasi yang tersedia	100	persen	30.220.000	
Pemutakhiran data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Beltim	Jumlah Daerah yang telah Dilaksasnakan Pemutakhiran data Potensi Investasi	1	Daerah	30.220.000	Pemutakhiran data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Beltim	Jumlah Daerah yang telah Dilaksasnakan Pemutakhiran data Potensi Investasi	1	Daerah	30.220.000	



RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu (Rp)	
1	2	3	4		5	1	2	3	4		5	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Investor baru yang berinvestasi	54	Investor	367.385.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Investor baru yang berinvestasi	54	Investor	367.385.000	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan sektor usaha yang dipromosikan	4	sektor	367.385.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan sektor usaha yang dipromosikan	4	sektor	367.385.000	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Beltim	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	dokumen	237.452.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Beltim	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	dokumen	237.452.000	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Beltim	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	dokumen	129.933.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Beltim	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	dokumen	129.933.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	94,7	persen	281.710.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	94,7	persen	281.710.000	
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan	29	persen	281.710.000	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan	29	persen	281.710.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Beltim	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.000	pelaku usaha	243.650.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Beltim	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.876	pelaku usaha	243.650.000	



RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting	
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target			Pagu (Rp)
1	2	3	4		5	1	2	3	4			5
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	60	Kegiatan Usaha	38.060.000	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	60	Kegiatan Usaha	38.060.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	62	investor	716.485.500	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	62	investor	716.485.500	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	30	persen	716.485.500	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	30	persen	716.485.500	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kab. Beltim	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	9	kegiatan usaha	125.940.500	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kab. Beltim	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	9	kegiatan usaha	125.940.500	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Beltim	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementgasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300	pelaku usaha	405.144.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Beltim	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementgasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300	pelaku usaha	405.144.000	



RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target		Pagu (Rp)	
1	2	3	4		5	1	2	3	4		5	
Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Beltim	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisis dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	75	kegiatan usaha	185.401.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Beltim	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisis dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	75	kegiatan usaha	185.401.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	85,71	persen	47.143.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	85,71	persen	47.143.000	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	78	persen	47.143.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	78	persen	47.143.000	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Beltim	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	dokumen	47.143.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Beltim	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	dokumen	47.143.000	
JUMLAH					6.567.595.566	JUMLAH					6.547.595.566	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan untuk urusan Penanaman modal pada tahun 2024 tidak ada,



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur sudah terangkum dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026. Program, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur. Berikut Tujuan dan Sasaran yang ada dalam dokumen perencanaan DPMPTSP yang telah disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, yaitu:

Untuk mendukung misi I : **Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik**, berikut tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan :

Tujuan:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

Sasaran :

- Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja;
- Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah;
- Meningkatkan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi

Untuk mendukung misi II : **Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja**, berikut tujuan dan sasaran dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan :

Tujuan:

- Meningkatnya investasi;

Sasaran :

- Meningkatkan investor yang berinvestasi;



Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur merupakan jalan untuk terwujudnya visi dan misi dari Kepala Daerah yang sudah menjadi visi dan misi Kabupaten Belitong Timur . Pada tahun 2024 Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur sebesar Rp 7.595.239.517,- terdiri dari urusan penunjang sebesar Rp 6.158.292.517,- dan Urusan Penanaman Modal sebesar Rp 1.436.947,-, namun dalam Perubahan Renja tahun 2024 ini ada menjadi sebesar Rp 6.547.595.566,- terdiri dari urusan penunjang sebesar Rp 5.095.626.066,- dan urusan Penanaman modal sebesar Rp 1.451.969.500,- Perubahan pagu ini dikarenakan berbagai macam alasan diantaranya:

1. Adanya perubahan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur, sehingga penghitungan kebutuhan pendanaan pegawai dan operasional serta target kinerja pada renja tahun 2024 masih belum menggambarkan keadaan sebenarnya;
2. Diterimanya anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melebihi dari penerimaan DAK tahun 2023 yang ada dalam Renja 2024, yaitu berupa DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal;
3. Adanya rasionalisasi beberapa kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga ada beberapa pekerjaan yang pada renja tahun 2024 diusulkan namun pada saat tahapan penyusunan PPAS maupun pembahasan anggaran tidak terakomodir;
4. Adanya penyesuaian anggaran, dengan kebutuhan dan target indikator yang akan dicapai.

Berikut Rekapitulasi Perubahan Pagu Indikatif tahun 2024 dan Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitong Timur

No	Urusan	Renja Murni Tahun 2024				Renja Perubahan Tahun 2024			
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Penanaman Modal	5	6	10	1.436.947.000	5	6	10	1.451.969.500
2	Urusan Penunjang	1	7	23	6.158.292.517	1	7	18	5.095.626.066
	JUMLAH				7.595.239.517				6.547.595.566



Tabel 3.2
Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitong Timur

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2024			Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju 2025	
							APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024				Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					URUSAN PENUNJANG					4.700.626.066	6.158.292.517	5.095.626.066					7.558.692.740
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	76 per se n	76 pers en	76 per sen	4.700.626.066	6.158.292.517	5.095.626.066				79 per sen	7.558.692.740
2	18	1	2, 0 1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 per se n	100 pers en	100 per sen	6.369.000	7.172.000	6.369.000				100 per sen	6.500.600
2	18	1	2, 0 0 1	0 0 0 1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Doku men	4 Dok ume n	4 Dok um en	6.369.000	7.172.000	6.369.000	OPD	Dana Transfer Umum;DAU	Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	4 Do ku me n	6.500.600
2	18	1	2, 0 2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar	100 per se n	100 pers en	100 per sen	2.993.278.326	3.495.253.716	3.021.707.426				100 per sen	4.731.207.940
2	18	1	2, 0 0 2	0 0 0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	36 Ora ng	21 Ora ng	2.993.278.326	3.495.253.716	3.021.707.426	OPD	Dana Transfer Umum;DAU	ASN	47 Ora ng	4.731.207.940



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2024			Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju 2025	
							APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024				Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18	1	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	79 persen	79 persen	79 persen	39.600.000	43.200.000	39.600.000				81 persen	38.600.000
2	18	1	2,0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	1 paket		-	-		OPD			0 paket	
2	18	1	2,0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	6 orang		-	-					0	
2	18	1	2,0011		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	8 Orang	7 Orang	39.600.000	43.200.000	39.600.000	Luar Daerah dan Kab. Beltim	Dana Transfer Umum;DAU	ASN dan pegawai DPMPSTP	7 Orang	38.600.000
2	18	1	2,006		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	85 persen	85 persen	85 persen	632.805.000	658.309.000	631.716.000				87,5 persen	642.362.100
2	18	1	2,00061		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	20.340.000	20.340.000	20.215.000	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPSTP	4 paket	15.338.800
2	18	1	2,00062		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	123.024.000	123.048.000	122.060.000	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPSTP	12 paket	99.999.900



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2024			Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju 2025	
							APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024				Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18	1	2,006	003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	9 paket	9 paket	31.400.000	41.716.000	31.400.000	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPPTSP	9 paket	31.398.000
2	18	1	2,006	004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	36.949.000	40.465.000	36.949.000	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPPTSP	10 paket	36.944.400
2	18	1	2,006	005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	61.257.000	72.905.000	61.257.000	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPPTSP	9 paket	48.846.000
2	18	1	2,006	006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4.860.000	4.860.000	4.860.000	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPPTSP	2 dokumen	4.860.000
2	18	1	2,006	008	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8 laporan	8 laporan	5 laporan	4.975.000	4.975.000	4.975.000	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPPTSP	4 laporan	4.975.000
2	18	1	2,006	009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68 laporan	68 laporan	68 laporan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Luar Daerah	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPPTSP	70 laporan	400.000.000
2	18	1	2,007		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	60 persen	60 persen	60 persen	50.650.000	413.548.000	50.650.000				65 persen	1.163.304.900



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2024			Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju 2025	
							APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024				Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18	1	2,071	001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	3 unit	unit		360.942.000		OPD		Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	1 unit	933.060.000
2	18	1	2,079	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	unit		-		OPD		Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	unit	
2	18	1	2,070	010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 unit	13 unit	19 unit	50.650.000	52.606.000	50.650.000	OPD	Dana Transfer Umum; Dana Bagi Hasil	Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	47 unit	230.244.900
2	18	1	2,071	011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 unit	unit		-						
2	18	1	2,088		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang kantor	88 persen	88 persen	88 persen	744.073.740	1.305.529.801	738.359.640				91 persen	516.157.200
2	18	1	2,081	001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	184.775.000	278.656.362	183.575.000	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPSTSP		
2	18	1	2,082	002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	166.660.000	183.260.000	166.660.000	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPSTSP	12 laporan	216.020.000



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2024			Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju 2025	
							APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024				Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18	1	2,008	4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	392.638.740	843.613.439	388.124.640	OPD	Penerimaan Pembiayaan	ASN dan pegawai DPMPSTP	12 laporan	300.137.200
2	18	1	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	94 persen	94 persen	94 persen	233.850.000	235.280.000	607.224.000				95 persen	460.560.000
2	18	1	2,092	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	20 unit	11 unit	146.130.000	147.430.000	146.130.000	Kab. Beltim	Dana Transfer Umum;DAU	Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	14 unit	162.310.000
2	18	1	2,099	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	7 unit	64.100.000	64.230.000	437.474.000	Kab. Beltim	Dana Transfer Umum;DAU ; DIF	Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	3 unit	275.070.000
2	18	1	2,091	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	50 unit	36 unit	23.620.000	23.620.000	23.620.000	Kab. Beltim	Dana Transfer Umum;DAU	Pegawai dan Masyarakat yang menerima layanan	34 unit	23.180.000
					PENANAMAN MODAL					1.458.569.500	1.436.947.000	1.451.969.500					1.057.867.000
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait Penanaman Modal yang telah ditetapkan	66,67 persen	66,67 persen	66,67 persen	39.246.000	39.246.000	39.246.000				100 persen	97.077.000



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2024			Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju 2025	
							APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024				Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18	2	2,01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan	2 kebijakan	2 kebijakan	1 kebijakan	9.026.000	9.026.000	9.026.000				1 kegiatan	32.379.000
2	18	2	2,001		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	9.026.000	9.026.000	9.026.000	Kab. Belitim	Dana Transfer Umum;DAU	Pelaku usaha/investor/penanam modal	- kegiatan usaha	-
2	18	2	2,0013		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-						10 Dokumen	32.379.000
2	18	2	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia	100 persen	100 persen	100 persen	30.220.000	30.220.000	30.220.000				100 persen	64.698.000
2	18	2	2,022		Pemutakhiran data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Daerah yang telah Dilaksanakan Pemutakhiran data Potensi Investasi	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	30.220.000	30.220.000	30.220.000	Kab. Belitim	Pendapatan Transfer antar Daerah	Pelaku usaha/investor/penanam modal	1 Daerah	64.698.000
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi	2 Investor	2 Investor	54 Investor	367.385.000	494.239.000	367.385.000				54 Investor	189.398.700



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2024			Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju 2025	
							APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024				Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18	3	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan sektor usaha yang dipromosikan	4 sektor	4 sektor	4 sektor	367.385.000	494.239.000	367.385.000				4 sektor	189.398.700
2	18	3	2,0002	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	237.452.000	489.889.000	237.452.000	Kab. Beltim	Dana Transfer Umum;DAU ; DIF	Pelaku usaha/ investor/ penanam modal	1 dokumen	189.398.700
2	18	3	2,0003	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	129.933.000	4.350.000	129.933.000	Kab. Beltim	Dana Transfer Umum;DAU	Pelaku usaha/ investor/ penanam modal	-	-
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu	84,5 persen	84,5 persen	94,7 persen	288.310.000	308.997.500	281.710.000				94,70 persen	68.961.600
2	18	4	2,001	1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan	10 persen	10 persen	29 persen	288.310.000	308.997.500	281.710.000				11 persen	68.961.600
2	18	4	2,0006	0	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	175 pelaku usaha	175 pelaku usaha	1.876 pelaku usaha	250.250.000	270.937.500	243.650.000	Kab. Beltim	Pendapatan Transfer antar Daerah	Masyarakat, pelaku usaha dan pegawai PTSP	1.000 pelaku usaha	38.331.600



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2024			Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju 2025	
							APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024				Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18	4	2,001	8	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	60 Kegiat an Usaha	60 Kegi atan Usa ha	60 Kegi ata n Usa ha	38.060.000	38.060.000	38.060.000		Pendapata n Transfer antar Daerah		60 keg iat an usa ha	30.630.000
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru berskala nasional yang merealisasikan investasinya	20 invest or	20 inve stor	62 inv est or	716.485.500	547.321.500	716.485.500				62 inv est or	686.483.100
2	18	5	2,001		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	8 perse n	8 pers en	30 per sen	716.485.500	547.321.500	716.485.500				8,50 per sen	686.483.100
2	18	5	2,001	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	12 kegiat an usaha	12 kegi atan usah a	9 kegi ata n usa ha	125.940.500	100.181.500	125.940.500	Kab. Beltim	DAK NF Fasilitas PM; Dana Transfer Umum DAU	masyarakat, pelaku usaha, penanam modal/ investor	12 keg iat an usa ha	97.618.000
2	18	5	2,001	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	216 pelaku usaha	216 pela ku usah a	300 pel aku usa ha	405.144.000	288.879.000	405.144.000	Kab. Beltim	DAK NF Fasilitas PM; Dana Transfer Umum DAU	masyarakat, pelaku usaha, penanam modal/ investor	300 pel aku usa ha	403.624.100



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BELITUNG TIMUR

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja 2024			Pagu			Lokasi Detail	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju 2025	
							APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	APBD 2024	Renja 2024	Renja Perubahan 2024				Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	18	5	2,001	006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisis dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	65 kegiatan usaha	65 kegiatan usaha	75 kegiatan usaha	185.401.000	158.261.000	185.401.000	Kab. Beltim	DAK NF Fasilitasi PM	masyarakat, pelaku usaha, penanam modal/ investor	75 kegiatan usaha	185.241.000
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan, non perizinan dan informasi penanaman modal dikelola berdasarkan sektor usaha	72,73 persen	72,73 persen	85,71 persen	47.143.000	47.143.000	47.143.000				81,82 persen	15.946.600
2	18	6	2,001		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	90,5 persen	90,5 persen	90,50 persen	47.143.000	47.143.000	47.143.000				91 persen	15.946.600
2	18	6	2,001	002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	47.143.000	47.143.000	47.143.000	Kab. Beltim	Pendapatan Transfer antar Daerah	masyarakat, pelaku usaha, penanam modal/ investor	12 dokumen	15.946.600
					JUMLAH					6.159.195.566	7.595.239.517	6.547.595.566					8.616.559.740



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai bulan Juni 2024 atau Triwulan II Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 dan bersifat indikatif.

Demikian diharapkan dokumen ini berfungsi sebagai acuan segenap jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 untuk Tahun Anggaran 2024 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan DPMPSTP Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2024.

Manggar, Agustus 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Belitung Timur



HARLI AGUSTA, ST
NIP 19750821 200212 1 005

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BELITUNG TIMUR
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00						10.062.158.040,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00							10.062.158.040,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00							10.062.158.040,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan				76 Persen	76 Persen	6.158.292.517,00	5.086.578.598,00	5.095.626.066,00	2.011.415.423,00							8.169.707.940,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	7.172.000,00	6.369.000,00	6.369.000,00	-803.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.172.000,00	6.369.000,00	6.369.000,00	-803.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar				100 Persen	100 Persen	3.495.253.716,00	3.379.230.858,00	3.021.707.426,00	-473.546.290,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		4.731.207.940,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/b ulan	21 Orang/b ulan	3.495.253.716,00	3.379.230.858,00	3.021.707.426,00	-473.546.290,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			4.731.207.940,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik				79 Persen	79 Persen	43.200.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	-3.600.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		181.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			76.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	7 Orang	43.200.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	-3.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				85 Persen	85 Persen	658.309.000,00	632.805.000,00	631.716.000,00	-26.593.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		912.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.340.000,00	20.340.000,00	20.215.000,00	-125.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			28.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	123.048.000,00	123.024.000,00	122.060.000,00	-988.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-			105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	41.716.000,00	31.400.000,00	31.400.000,00	-10.316.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			47.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.465.000,00	36.949.000,00	36.949.000,00	-3.516.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	72.905.000,00	61.257.000,00	61.257.000,00	-11.648.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	4 Dokumen	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	-4.860.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	NON URUSAN							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00							10.062.158.040,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00							10.062.158.040,00		
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00							10.062.158.040,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00							10.062.158.040,00		
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	5 Laporan	4.975.000,00	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				68 Laporan	68 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				60 Persen	60 Persen	413.548.000,00	50.650.000,00	50.650.000,00	-362.898.000,00			-	-	-		730.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	360.942.000,00	0,00	0,00	-360.942.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	NON URUSAN							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00							10.062.158.040,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00							10.062.158.040,00		
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00							10.062.158.040,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00							10.062.158.040,00	
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	19 Unit	52.606.000,00	50.650.000,00	50.650.000,00	-1.956.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor				88 Persen	88 Persen	1.305.529.801,00	744.073.740,00	738.359.640,00	-567.170.161,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		775.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	278.656.362,00	184.775.000,00	183.575.000,00	-95.081.362,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			245.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	183.260.000,00	166.660.000,00	166.660.000,00	-16.600.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	843.613.439,00	392.638.740,00	0,00	-843.613.439,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	NON URUSAN							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00							10.062.158.040,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00							10.062.158.040,00	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00							10.062.158.040,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00							10.062.158.040,00	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				94 Persen	94 Persen	235.280.000,00	233.850.000,00	607.224.000,00	371.944.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		820.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	11 Unit	147.430.000,00	146.130.000,00	146.130.000,00	-1.300.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			355.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	7 Unit	64.230.000,00	64.100.000,00	437.474.000,00	373.244.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			430.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	36 Unit	23.620.000,00	23.620.000,00	23.620.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan kebijakan daerah terkait penanaman modal yang telah ditetapkan				66,67 Persen	66,67 Persen	39.246.000,00	39.246.000,00	39.246.000,00	20.754.000,00							60.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha dibidang penanaman modal yang telah disusun berdasarkan ketentuan				2 kebijakan	1 kebijakan	9.026.000,00	9.026.000,00	9.026.000,00	0,00			-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	Penanam Modal/ Investor dan pelaku usaha		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	9.026.000,00	9.026.000,00	9.026.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase informasi investasi yang tersedia				100 persen	100 persen	30.220.000,00	30.220.000,00	30.220.000,00	0,00			-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																		
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	1 Daerah	30.220.000,00	30.220.000,00	30.220.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berinvestasi				2 Investor	54 Investor	494.239.000,00	367.385.000,00	367.385.000,00	135.948.500,00							630.187.500,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan sektor usaha yang dipromosikan				4 sektor	4 sektor	494.239.000,00	367.385.000,00	367.385.000,00	-126.854.000,00			-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	Penanam Modal/ Investor dan pelaku usaha		630.187.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	489.889.000,00	237.452.000,00	237.452.000,00	-252.437.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	4.350.000,00	129.933.000,00	129.933.000,00	125.583.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing			130.187.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu				84,5 Persen	94,70 Persen	308.997.500,00	288.310.000,00	281.710.000,00	249.834.100,00							558.831.600,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan				10 persen	29 persen	308.997.500,00	288.310.000,00	281.710.000,00	-27.287.500,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		558.831.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				175 Pelaku Usaha	1876 Pelaku Usaha	270.937.500,00	250.250.000,00	243.650.000,00	-27.287.500,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			538.831.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				60 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	38.060.000,00	38.060.000,00	38.060.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Investor baru yang berskala nasional yang merealisasikan investasinya				20 investor	62 investor	547.321.500,00	716.485.500,00	716.485.500,00	36.109.500,00							583.431.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan investor terhadap kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)				8 persen	30 persen	547.321.500,00	716.485.500,00	716.485.500,00	169.164.000,00			-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing	-		583.431.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				12 Kegiatan Usaha.	9 Kegiatan Usaha.	100.181.500,00	125.940.500,00	125.940.500,00	25.759.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing			140.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				216 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	288.879.000,00	405.144.000,00	405.144.000,00	116.265.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing			218.431.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan : serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				65 Kegiatan Usaha	75 Kegiatan Usaha	158.261.000,00	185.401.000,00	185.401.000,00	27.140.000,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing 5. Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing			225.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data Perizinan, Non Perizinan dan Indormasi Penanaman Modal dikelola Berdasarkan Sektor Usaha				72,73 persen	85,71 persen	47.143.000,00	47.143.000,00	47.143.000,00	12.857.000,00							60.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan</i>				90,50 Persen	90,5 Persen	47.143.000,00	47.143.000,00	47.143.000,00	0,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	47.143.000,00	47.143.000,00	47.143.000,00	0,00	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		J U M L A H							7.595.239.517,00	6.545.148.098,00	6.547.595.566,00	-1.047.643.951,00						10.062.158.040,00		



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-557 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu diubah Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dengan Perangkat Daerah terverifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Hasil Verifikasi
1.	Sekretariat Daerah	Sesuai
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sesuai
3.	Inspektorat Daerah	Sesuai
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sesuai
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sesuai
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sesuai
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai
8.	Dinas Pendidikan	Sesuai
9.	Dinas Kesehatan	Sesuai
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sesuai
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sesuai
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sesuai
13.	Dinas Perhubungan	Sesuai
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sesuai
15.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sesuai
17.	Dinas Pertanian dan Pangan	Sesuai
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai
19.	Dinas Perikanan	Sesuai
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai
21.	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai
22.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sesuai
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sesuai
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sesuai
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sesuai
27.	Kecamatan Manggar	Sesuai
28.	Kecamatan Gantung	Sesuai
29.	Kecamatan Kelapa Kampit	Sesuai
30.	Kecamatan Dendang	Sesuai
31.	Kecamatan Damar	Sesuai
32.	Kecamatan Simpang Renggang	Sesuai
33.	Kecamatan Simpang Pesak	Sesuai

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN